

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: CHAPTER BUKU***

Judul Buku : Komunitas Pembangunan dan Globalisasi
 Judul Chapter Buku : Birokrasi Sumatera Barat 1945-1950
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Indah Adi Putri
 Status Pengusul :

Identitas Buku
 a. Nomor ISBN : 978-602-6506-66-5
 b. Edisi : Pertama
 c. Tahun Terbit : November 2017
 d. Penerbit : Erka CV Rumah Kayu Pustaka Utama
 e. Jumlah Halaman : 369-390 (chapter), 687(buku)

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku : Buku Referensi

(beri tanda \checkmark pada kategori yang tepat)

Buku Monograf

Bareh chapter, nasional

Hasil Penelitian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku		Nilai Akhir yang Diperoleh (NA)
		Referensi	Monograf	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
a	Kelengkapan unsur buku (20%)	2		
b	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%)	2		
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	1		
d	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)	2		
	Total = (100%)			
	Nilai Pengusul (NA X BP ***) = $7 \times 1 = 7$			

Catatan Penilaian Buku Oleh Reviwer:

- Pembahasan tidak begitu korek dgn isu tulisan
- Tidak ada penjelasan soal metodologi

Padang,
 Reviewer 1/2 **

[Signature]
 Prof. Dr. Nurhikmah Effendi
 NIP: 196406291990011002
 Unit Kerja: FISIP-UA

Bidang Ilmu: Ilmu Sosial/ Antropologi
 Jabatan/Pangkat: Pembina Utama Madya / II d

- * Dinilai oleh dua reviewer secara terpisah
- ** Coret yang tidak perlu
- *** Bobot Peran (BP): Sendiri = 1; Penulis Pertama= 0,6; Anggota= 0,4 dibagi jumlah anggota

7
2.0

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: CHAPTER BUKU***

Judul Buku : Komunitas Pembangunan dan Globalisasi
 Judul Chapter Buku : Birokrasi Sumatera Barat 1945-1950
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Indah Adi Putri
 Status Pengusul :

Identitas Buku

a. Nomor ISBN : 978-602-6506-66-5
 b. Edisi : Pertama
 c. Tahun Terbit : November 2017
 d. Penerbit : Erka CV Rumah Kayu Pustaka Utama
 e. Jumlah Halaman : 369-390 (chapter), 687(buku)

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku : Buku Referensi

(beri tanda \checkmark pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penelitian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku		Nilai Akhir yang Diperoleh (NA)
		Referensi	Monograf	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur buku (20%)	10		2
b	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%)	8		2,4
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	8		2,4
d	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)	10		2
	Total = (100%)			8,8
	Nilai Pengusul (NA X BP ***) =X..... =			8,8

Catatan Penilaian Buku Oleh Reviewer:

Karya ilmiah yang menarik dan bermanfaat.

Padang, 22/7/2019
 Reviewer 1/2**

NIP: 19730913200012012
 Unit Kerja: PSIP

Bidang Ilmu: Ilmu Politik
 Jabatan/Pangkat: Lektor Kepala / W. B.

* Dinilai oleh dua reviewer secara terpisah

** Coret yang tidak perlu

*** Bobot Peran (BP): Sendiri = 1; Penulis Pertama= 0,6; Anggota= 0,4 dibagi jumlah anggota

BAB 17

BIROKRASI SUMATERA BARAT TAHUN 1945-1950

Oleh Indah Adi Putri*

Wat verschijne, wat verdwijne

Het hangt niet aan een los geval

In het heden ligt het verleden

In het nu wat worden zal !

(Apa pun yang terjadi, apapun yang akan sirna

Yang satu tidak terlepas dari yang lainnya

Dalam masa kini, terletak masa lalu

Keadaan sekarang menjadi yang akan datang !)

(Ahmad Husein, 17 Agustus 1991)

Pendahuluan

Sumatera Barat terletak di sebelah barat pulau Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 42.297,30 km², dan kondisi alam yang sebagian besar masih diliputi oleh kawasan lindung (44,91% persen dari luas keseluruhan, di mana kawasan

* Dosen Jurusan Ilmu Politik - FISIP Universitas Andalas

indung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup)⁹².

Secara alamiah Sumatera Barat adalah daerah pegunungan bukit barisan, terletak di belahan barat pulau Sumatera, bagian tengah. Tanahnya kawasan vulkanik subur, bergunung-gunung, dataran tinggi pertanian, memiliki banyak danau (Maninjau, Singkarak, danau di atas/ di bawah) dan lembah (Anai, Ngarai Sianok, Lembah harau). Alam yang sedemikian laksana panorama indah. Sedangkan pesisir baratnya yang sempit-tempat ombak berdebur, kata orang Minang-menghadap ke Samudra Indonesia. Penduduk Sumatera Barat adalah orang minang⁹³ (95%) dan suku lainnya⁹⁴.

Sejarah panjang politik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dapat ditelusuri sejak abad ke-18. Beberapa prasasti (diantaranya patung Adityawarman yang ada di Monumen Nasional, Jakarta) menjadi bukti berharga eksistensi budaya minang⁹⁵ sejak masa pra kemerdekaan dan

⁹² Sumber : Statistik Daerah Sumatera Barat Tahun 2012, Padang : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2013

⁹³ Masyarakat Minang dikenal sebagai masyarakat yang unik karena memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan (Islam). Sebab "Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK). Masyarakat Minang adalah masyarakat matrilineal, garis keturunan ibu menentukan suku (*clan*). kehidupan tradisional orang Minang adalah kehidupan bersama yang dipimpin oleh mamak. Ada mamak adat (ninik mamak, pimpinan kaum), mamak ibadat (ulama) dan cerdik pandai. Ketiga unsur kepemimpinan itu; ninik mamak (pimpinan adat), ulama dan cerdik pandai (intelektual) dikisahkan sebagai "tungku tiga sejerangan" atau "tali tigo sapolin (Durin, 1997:9)

⁹⁴ Dituliskan kembali dari buku Hasan Basri Durin, *Catatan Seorang Pamong*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997. Hal.8

⁹⁵ Sekalipun sebagian sejarah Minangkabau banyak diwariskan melalui tambo atau legenda, tetapi juga tidak sedikit bukti-bukti sejarah melalui dokumen dan prasasti kejayaan kerajaan Minangkabau. Plakat Panjang, Patung Adityawarman, prasasti besar Pagaruyung. Batu Basurek adalah sebagian kecil saksi sejarah tersebut. Lebih lengkapnya, baca tulisan Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981. Disebutkan juga beberapa prasasti bahkan bertuliskan masa abad ke 12 dan 13. Muhamad Radjab dalam bukunya Perang Paderi mengatakan di akhir abad ke-18 sebelum bangsa Belanda menjejakkan kakinya di Padang Darat, rakyat daerah yang sangat permai dan subur pada umumnya hidup dalam kemakmuran. Kesentosaan mereka hanya kadang-kadang diganggu oleh perkelahian dan perang batu antara dua golongan rakyat, dari koto Piliang dan Caniago. Pertentangan paham antara dua legislatornya, Datu Katumanggung dan Perpatih nan Sebatang menimbulkan perbenturan antara dua cara berpikir, aristokratis dan demokratis. penduduk Minangkabau seluruhnya terbagi dalam dua belas

setelah berintegrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa literatur menyebutkan (Radjab 1954, Amran 1981,1985, Kahin 2008, Jalal 2004) kejayaan kerajaan Minangkabau tersohor sampai ke India dan Cina, sebelum akhirnya menjadi "sejarah peradaban" karena adanya imperialisme dan kolonialisme⁹⁶.

Kemasyhuran kerajaan minang masa lalu kemudian juga diikuti oleh ketokohan figur-figur pahlawan dari Sumatra Barat dimasa perlawanan terhadap penjajah sampai era kemerdekaan. *The founding father* Indonesia, pemikir, sastrawan berpengaruh, banyak yang berasal dari Sumatra Barat. Sebut saja Hatta, Natsir, Syahrir, Agus Salim, Muhammad Yamin, Tan Malaka, Hamka, Marah Rusli⁹⁷, Abdul Muis bahkan Tuanku

suku yang berbeda-beda namanya, tiap orang yang sesuku menganggap dirinya ada pertalian darah. Malahan seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang sesuku dengan dia. Pemerintahan kampung dipegang oleh rapat kepala-kepala suku, dan semua datuk di kampung tersebut ialah yang memilih kepala negeri, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tiap keputusan yang bersangkutan dengan urusan penduduk sekampung diambil oleh rapat penghulu yang diadakan di balairung. Datuk-datuk (Tuanku) itulah yang berpengaruh di dalam rapat dan di pergaulan hidup kampung tersebut. Tiap luhak, laras dan kampung boleh dikatakan berdiri sendiri. Raja yang bersemayam di Pagaruyung dan dianggap sakti dan bertuah hanya melihat dari jauh. Muhamad Rajab, *Perang Paderi di Sumatera Barat 1803-1838*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K, 1954. Hal.3-4

⁹⁶ Istilah kolonialisme mengacu pada apa yang dikatakan Paul H.Kratoska yang menuliskan.... *colonialism was a set of complex and shifting phenomena, shaped by political and economic pressure in the countries that held overseas territories, in the colonial areas, and in the broader world environment. The penultimate phase of colonialism in Southeast Asia, preceding the transition to independence, featured radical proposals designed to restructure the territories held by the colonial powers and to create new mechanism of government and administration..*(kolonialisme adalah fenomena yang kompleks, dimana terjadi tekanan secara ekonomi dan politik terhadap bangsa-bangsa, negara yang menjadi jajahan). Dalam buku, Thee Kian Wie (ed), *The Asia-Pacific Century Historical Perspective*, Jakarta: LIPI Press, 2005. Hal.141-150

Dari catatan seorang pangrehpraja Belanda yang bertugas di Sumatra Barat tahun 1933 sampai 1941, mengatakan bahwa tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda menyerahkan urusan pelayanan bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, penyuluhan pertanian, peternakan dan pekerjaan umum kepada kelompok masyarakat Minangkabau (kelompok bentukan Belanda yang diberi nama Minangkabau juga (R.c.Kwantes, 2001:243).

⁹⁷ Marah Rusli terkenal dengan novelnya "Siti Nurbaya", Abdul Muis terkenal dari novelnya "Salah Asuhan", dan Hamka adalah tokoh sastrawan berpengaruh sampai sekarang.

Imam Bonjol⁹⁸ yang begitu sulit ditaklukkan oleh Belanda pada masa perang Paderi⁹⁹ di daerah Bonjol, Pasaman. Bahkan tokoh perempuannya pun ambil bagian dalam perubahan sosial politik masa itu, Siti Manggopoh, Rasuna Said, dan Rahmah elYunusiyah (lebih dikenal dengan Siti Rahmah¹⁰⁰) dan Rohana Kudus¹⁰¹ yang telah bergerak dengan lewat pers bertajuk "Sunting Melayu"¹⁰².

Perubahan sosial dan politik yang terjadi dari masa ke masa menjadi bagian tak terpisahkan terhadap karakter/personaliti¹⁰³ dari masyarakat

⁹⁸ Tuanku Imam Bonjol salah seorang pahlawan yang dihormati, pada mulanya termasuk salah seorang pemimpin dari kelompok Delapan Orang, terkenal dengan nama "Harimau nan Salapan" berasal dari delapan aliran ulama yang berpengaruh di Minangkabau, yaitu: Tuanku Pemansiang Ketua, Tuanku Kubu Ambalu, wakil ketua dan anggotanya. Tentang bagaimana heroiknya perang Paderi oleh Tuanku Imam Bonjol melawan pasukan Belanda, lebih lengkap baca tulisan Muhamad Radja, *Perang Paderi di Sumatera Barat 1838*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P.dan K, 1954.

⁹⁹ Berbagai perang menghadapi penjajahan mengukir sejarah masyarakat Minang. Perang Padri (1821-1837), perang Kamang (1908), Perang Silungkang (1926). (Durin, 1997:10)

¹⁰⁰ Perintis dan pendiri Sekolah Diniyah Poetri Padang Panjang

¹⁰¹ Berasal dari Koto Gadang, memperjuangkan emansipasi kaum perempuan dengan mendirikan perkumpulan Amai Setia, menerbitkan *Sunting Melayu* (Durin, 1997:11)

¹⁰² Tokoh-tokoh berpengaruh dari Sumatera Barat dengan kiprahnya, baca Ahmad Husein dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950*, Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM), 1991. Hal.9-19

¹⁰³ Amri Marzali, dalam tulisan bertajuk "Kompleks Minang" menyebut modal personaliti yang khas pada orang minangkabau, yaitu "gelisah". Modal personaliti tersebut juga adalah karena banyaknya kontroversi struktural dalam masyarakat minang. Struktur masyarakat Minangkabau yang penuh dengan kontroversi sebagai akibat dari adat matrilineal Minangkabau; 1) yang melahirkan dan yang punya anak adalah perempuan (*mande*), 2) yang punya kuasa dan wewenang terhadap kaum perempuan dan anak-anak adalah laki-laki (*mamak, datuk, penghulu*), 3) keturunan ditarik dan ditelusuri melalui garis perempuan. 4) anggota kelompok- keturunan (*suku, payung, paruik, kampuang* dan *rumah gadang*) diangkat atau direkrut melalui garis perempuan. 5) pewarisan harta pusaka, *rumah gadang*, gelar, kedudukan dan kekuasaan politik dilaksanakan melalui garis perempuan, 6) perkawinan eksogami—kelompok (eksogami, *suku, payuang* atau *paruik*) adalah suatu keharusan. Sebaliknya, perkawinan endogami-kelompok (endogami *suku, payung* atau *paruik*) adalah *incest taboo*. Lebih lengkapnya baca buku karya Fasli Jalal dkk (ed), *Minangkabau yang Gelisah*, Bandung: Lubuk Agung, 2004. Amri Marzali mengatakan kontroversi struktural secara tidak disadari telah membentuk personaliti dan temperamen yang khas pada orang minang. Salah satu unsur dari personaliti dan temperamen tersebut adalah gelisah mencari. Gelisah mencari bentuk-bentuk struktur yang stabil tidak kontroversial.

R.C Kwantes dalam tulisannya berjudul "Taga' Samo Tinggi, Dudue' samo Randah" yang merupakan bagian dari buku S.L van Der Wal (ed), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*, Jakarta: Djambatan, 2001. Hal.261 mengatakan watak

Minangkabau. Mestika Zed membagi sejarah modern Sumatra Barat ke dalam empat episode berbeda, yaitu antara 1945-1950; 1950-1961; 1961-1971 dan 1971-1995.

Periode revolusi 1945-1950 adalah episode sejarah yang paling gemuruh, suatu drama yang memadukan perjuangan fisik (bersenjata) dengan perundingan (diplomasi, intelek); memadukan tujuan rasional dengan sentimen emosional; memadukan tindakan konkret dengan cita-cita dan impian; memadukan realitas dan mitos. Periode 1950-1961 tidak mengalami banyak perbedaan berarti dari periode sebelumnya, tetapi jelas konflik dan krisis politik yang dialaminya tidak lagi dalam bentuk perlawanan menantang kekuasaan asing, kolonial Belanda, melainkan dalam upaya menegakkan demokrasi sebagai inti dari kemerdekaan. Sekali lagi, karena inisiatif yang diambilnya dan yang diikuti oleh daerah lain, telah membawanya kepada situasi krisis 'perang saudara' dalam era Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI 1958-1961) dan hingga kini masih meninggalkan kesan-kesan pengalaman traumatis bagi mereka yang mengalaminya¹⁰⁴.

Makalah ini akan fokus terhadap periode penting Sumatera Barat dalam proses integrasi ke negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu awal kemerdekaan 1945-1950 sebab untuk mengkaji lebih dalam birokrasi Sumatera Barat kekinian harus memahami periode penting ini terlebih dahulu. Terlebih penelusuran akar historis masyarakat menjadi penting manakala berhadapan dengan tantangan kekinian yang begitu kompleks. Sebagaimana dikatakan Mochtar Naim, salah satu permasalahan besar yang dihadapi orang Minang dewasa ini adalah kehilangan dari yang paling berharga dari dirinya sendiri, jati diri. Sejarah suatu suku bangsa tidaklah lempang dan menanjak terus, tetapi bergelombang dan berliku-liku. Ada masa turun, ada masa naik, ada masa di atas, ada masa di bawah.

orang Minangkabau di mata seorang pengamat Eropa yang menilainya menurut ukuran Eropa; pada umumnya bersifat angkuh dan curiga, sering juga suka mencampuri urusan orang lain, bebas tindak tanduknya, juga terhadap atasan, bahkan terhadap orang yang berpengaruh

¹⁰⁴ Dikutip dari buku Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998. Hal.xi-xii.

Tetapi di sisi lain, turun naiknya peredaran sejarah itu adalah konsekuensi logis dari greget dan stamina kehidupan serta kemauan hidup dan bertahan hidup (*the will to live and to survive*). Trauma kekalahan PRRI bagi orang Minang kelihatan membekas dalam¹⁰⁵. Menurut Fakhri Ahmad:

Tantangan mendasar yang kita hadapi adalah menjawab pertanyaan skeptis dari generasi muda: "apakah ada hubungan yang signifikan antara kesiapan menghadapi masa depan dengan pemertanian identitas keminangan? Pandangan semacam ini memperlihatkan kecenderungan yang menggelisahkan. Memang benar, *sakali aia gadang, sakali tapian baraliah* (sekali air bah besar datang, tepian sungai hanyut dan berubah). Tapi jangan sampai terjadi, *tapian Minangkabau* dihanyutkan oleh derasnya *aia gadang* peradaban dunia¹⁰⁶.

Dalam konteks Indonesia, istilah integrasi nasional merujuk pada integrasi atau keterpaduan dalam segala aspek kehidupan bangsa, yang secara umum meliputi sosial, budaya, dan politik dan ekonomi, yang dapat berupa integrasi vertikal (antara elit dengan massa) dan horizontal (integrasi antar kelompok-kelompok dalam masyarakat) di dalam aspek-aspek kehidupan itu¹⁰⁷. Maka dalam perspektif integrasi tersebut, makalah ini berusaha melihat sejarah birokrasi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat terutama pada masa sebelum dan sesaat setelah Indonesia merdeka.

Pembahasan

Perubahan sosial dan politik¹⁰⁸ yang terjadi di Sumatera Barat di awal kemerdekaan Indonesia ditandai oleh berbagai peristiwa penting, yang

¹⁰⁵ Mochtar Naim, "Dengan ABS-SBK kembali ke Jati Diri", dalam *Op.Cit.* hal.39-40.

¹⁰⁶ *Ibid.* hal.30-31

¹⁰⁷ Nazaruddin Syamsuddin, "Masalah Otonomi daerah dan Integrasi Nasional" dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Tinjauan Kritis tentang *Integrasi Bangsa* 16-17 Januari 1996, Depok : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996. Hal.2-3

¹⁰⁸ Menurut Lapalombara, perubahan yang terjadi (sosial dan ekonomi) dapat berpengaruh terhadap pembangunan politik (pembangunan politik dipahami sebagai transformasi dari

tercatat dalam sejarah sebagai momen berpengaruh dalam tonggak politik negara Indonesia. Di Sumatera Barat, akibat peraturan Plakat Panjang¹⁰⁹ di tahun 1833, susunan pemerintahan bersifat kelarasan sampai tahun 1914; Tuanku Laras sebagai Kepala Adat dan Kepala Suku diberi kedudukan tinggi, sesuai dengan martabatnya dalam susunan adat¹¹⁰. Di zaman pendudukan militer Jepang (1942-1945) peranan Sumatera Barat baik secara politik dan militer sangat penting. Pusat tentara Jepang di Sumatera terletak di Bukittinggi, begitupun Sumatra Cuo Sangi In (semacam DPR sementara) pimpinan Mohd.Sajfe'i (Durin, 1997:12).

Selanjutnya birokrasi¹¹¹ di Sumatera Barat masa awal kemerdekaan sangat terpengaruh oleh zaman kolonialisme. Karena sejak februari 1942

suatu sistem politik menjadi sistem politik lainnya). Hal ini dapat dilihat berbeda pada negara maju dan negara berkembang. Dan birokrasi adalah independen variabel penting yang sangat berpengaruh terhadap transformasi di negara-negara berkembang, meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik (Lapalombara, 1967:4) Kahin (2008) menuliskan perubahan politik penting yang berpengaruh terhadap politik di Sumatera Barat ditandai oleh peristiwa-peristiwa seperti, kembalinya Tan Malaka ke Sumatera Barat dengan pemikirannya yang berpengaruh, adanya front Rakyat di Sumatera Barat, gerakan masyarakat di Baso, Peristiwa 3 maret, adanya Pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI), perjuangan masyarakat lokal, penolakan terhadap federalisme, dan berakhirnya perjuangan bersenjata.

¹⁰⁹ Plakat Panjang adalah semacam aturan yang dibuat oleh Belanda yang diumumkan pada 25 oktober 1833 yang dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Van Sevenhosen dan Jenderal Mayor Riestz atas nama Komisaris Jenderal Van den Bosch, yang sifatnya membujuk rakyat di daerah Minang yang berada di darek (Tanah datar sampai pasaman) dan di laut (Kota Padang sekarang) untuk taat dan patuh pada pemerintah Belanda. Lebih lengkap, baca tulisan Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, Jakarta : Sinar Harapan, 1985. Hal.15-19. Isi Plakat Panjang antara lain bahwa penduduk Sumatra Barat diizinkan sepenuhnya memiliki hak politik dan hak ekonomi, dan tidak akan menarik pajak. Tetapi setelah Bonjol jatuh, tahun 1930-an dalam praktik pemerintahan Plakat Panjang sudah tidak diikuti lagi

¹¹⁰ Setelah ketentuan mengenai perpajakan dikeluarkan dalam tahun 1908 yang berakibat perang di kamang karena Belanda tidak menghormati isi Plakat Panjang.

¹¹¹ Kata birokrasi di sini mengacu kepada apa yang dikatakan Meehan; bahwa birokrasi adalah sekelompok orang yg terorganisir yg menjalankan tugas-tugas mereka menurut aturan-aturan & prosedur yg telah ditetapkan berdasarkan ketentuan jabatan, dan bukan ketentuan orang (Eugene J.Meehan; 1966). Atau Sistem otoritas, manusia, kantor dan metoda yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya (J.M. Pfifner & Robert U. Presthus; 1967). Sehingga birokrasi adalah sistem formal yang bekerja dengan aturan dan prosedur untuk menjalankan program pemerintah dalam memenuhi tuntutan publik. Sumatera seperti halnya pulau Jawa, merupakan wilayah administrasi tersendiri di bawah seorang kepala pemerintahan militer Jepang yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Di sini tempat bersidangnya badan Tyuo Sangi In, kalau di Jawa Tyo Sangi Komunitas, Pembangunan, dan Globalisasi 375

Jepang memulai invasinya di Sumatera (untuk mendahului rencana Belanda merusak instalasi minyak di Riau. Tentara Jepang pertama memasuki kota Padang pada 17 maret 1942, dan sepuluh hari kemudian komandan militer Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat (Kahin 2008:135). Menurut Kahin selama tahun pertama itu,

Fokus utama tentara pendudukan Jepang adalah untuk memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatra, sehingga dengan demikian mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumberdaya vital yang ada di pulau ini, khususnya ladang minyak di dekat Palembang dan perkebunan karet di Sumatra Timur. Untuk itu, tentara pendudukan Jepang menghidupkan kembali sistem pemerintahan peninggalan Belanda dan mengangkat kembali sebagian besar mantan pejabat Indonesia yang pernah duduk di pemerintahan kolonial Belanda¹¹².

Beberapa peristiwa bersejarah selama pendudukan Jepang di Padang antara lain; keberadaan Soekarno yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda di Padang sedikit banyak telah mencegah tindakan kasar tentara Jepang terhadap rakyat Sumatra Barat. Bulan-bulan pertama pendudukan Jepang, Kolonel Fujiyama dan asistennya Wakamatsu, yang bertanggung jawab dalam membentuk jajaran pemerintah di Sumatra Barat, mengandalkan nasihat seorang pejabat lokal, Dt.Madjo Urang dalam menentukan pejabat-pejabat baru. Tanggal 29 Juni 1943 pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan pembentukan tentara sukarela di Jawa, Sumatra, Kalimantan Utara dan Malaya untuk membantu balatentara Jepang mempertahankan kawasan dari balasan tentara sekutu. Pasukan ini dikenal dengan nama Giyu gun¹¹³. Angkatan

In diketuai oleh Bung Karno, maka Tyou Sangi In di Sumatera diketuai oleh M.Sjafei dan Adi Ngoro sebagai kepala urusan umumnya (Somubutyo) (Husein, dkk 1991:77)

¹¹² Audrey Kahin, *Op.Cit.* hal.135

¹¹³ Di Jawa pemerintah Jepang mendirikan Pembela Tanah Air (PETA), di Sumatra Barat namanya Gyu Gun (laskar Rakyat). Tiga orang yang dijadikan pemimpin dianggap sebagai Tungku Tigo Sajarangan; Ahmad Dt.Simarajo dari golongan adat, Chatib Soelaiman dari cerdik pandai, dan Haji Mahmud Yunus dari golongan alim ulama. Dengan Chatib

pertama perwira-perwira Giyu gun yang dilatih oleh Jepang mencakup empat pria yang kemudian menjadi tokoh utama pendiri tentara kemerdekaan daerah pada 1945. Tiga di antaranya sudah sangat terkenal di kalangan komunitas muslim setempat pada beberapa tahun terakhir penjajahan Belanda; yaitu Dahlan Djambek, Sjarief Usman dan Dahlan Ibrahim, serta Ismael Lengah (Kahin, 2008: 147).

Di masa pendudukan Jepang pejuang-pejuang nasionalis-baik yang sekuler maupun keagamaan-diberi kesempatan sebagai tokoh-tokoh politik. Mohammad Sjafei, Chatib Sulaeman dan kawan-kawan menyusun perhimpunan pendukung yang luas di seluruh Sumatera Barat dan menggunakan pidato-pidato mereka untuk menanamkan cita-cita kebangsaan kepada para pengikut yang sebelumnya belum banyak tahu tentang gerakan nasionalis Indonesia. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 14 agustus 1945 hanya terhambat sementara ke Sumatra Barat. Rakyat memberi respon yang sangat cepat begitu mendengar desas-desus yang melaporkan bahwa Sukarno dan Hatta telah memproklamirkan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Para aktivis segera memanfaatkan situasi membentuk pemerintahan Republik di Sumatra Barat dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan sejak pertengahan Agustus 1945 hingga mendaratnya tentara sekutu pada pertengahan Oktober 1945. Pada tanggal 29 Agustus, Mohammad Sjafei¹¹⁴ atas nama rakyat Sumatra mengeluarkan

Soelaiman sebagai ketua dan dibantu oleh diantaranya Rasuna Said dan Rahmah el Yunusiyah

¹¹⁴ Moehammad Sjafei dalam kedudukannya sebagai mantan Ketua Chuo Sangi'in (Dewan Penasehat Sumatera) ciptaan Jepang, merasa mampu berbicara untuk rakyat Sumatera. Setelah membacakan salinan teks proklamasi yang baru saja diterima Sumatera Barat, ia selanjutnya membacakan dengan penuh hati-hati teks tambahan Proklamasi versi Sumatera Barat itu. Salah seorang pelaku sejarah dalam pertemuan itu, Nasroen A.S menceritakan kembali bagaimana pidato Engku Sjafei saat itu disampaikan seperti seorang guru memberikan nasehat kepada murid-muridnya. Itu pula yang menjadi alasan mengapa Engku Sjafei akhirnya terpilih sebagai Ketua KNI (Komite Nasional Indonesia) (Mestika Zed dkk, 1998: 5). Moehammad Sjafei juga adalah pendiri INS Kayu Tanam (1926), di mana banyak alumuninya menjadi tokoh. Seperti AA.Navis, Bustanil Arifin (mantan Kabulog) dan Kaharuddin Nasution (mantan gubernur Riau) (Durin, 1997:11)

pernyataan umum menerima Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah selesai membacakan teks Proklamasi, Sjahrir melanjutkan dengan :

Maka kami bangsa Indonesia di Soematra dengan ini mengakui Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjoenjoeng keagoengan kedua pemimpin Indonesia itu¹⁵.

Peta formasi kelembagaan kekuatan revolusi pada awal Proklamasi di Sumatera Barat menurut Mestika Zed harus memperhatikan sejumlah organisasi atau pranata resmi yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Terdiri dari : Komite Nasional Indonesia (KNI)¹⁶, organisasi pemuda (aktivis politik dan militer atau BKR, partai politik badan Pemerintahan Keresidenan dan juga kelompok politik dan organisasi massa¹⁷.

Komite Nasional Indonesia di Sumatera Barat

Golongan pertama yang menjadi kekuatan revolusi di Sumatera Barat ialah kelompok pemimpin generasi tua, atau tokoh nasionalis senior. Mereka adalah aktivis politik sejak zaman Jepang dan bahkan sejak zaman pergerakan sebelumnya (sebagian adalah "ambtenaar", pegawai senior yang berpengalaman dalam pemerintahan Belanda

Pada zaman Jepang mereka ini umumnya bergabung dalam Hokokai, yaitu suatu badan tempat menghimpun para pemimpin terkemuka daerah untuk tujuan propaganda Jepang. Pada awal

¹⁵ Dikutip kembali dari Kahin, 2008, hal.155

¹⁶ KNI adalah badan perwakilan untuk membantu pemerintah pusat negara Republik Indonesia. Di pusat diketuai pertamakali oleh Mr.Kasman Singodimedjo, kemudian Sutan Sjahrir. Usaha-usaha KNI adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan keinginan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka; 2. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya berpadu dalam segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat. 3. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. 4. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah untuk kesejahteraan umum (Husein, 1991:115)

¹⁷ Mestika Zed, *Op.Cit*, hal.16

revolusi, badan ini dibubarkan dan digantikan dengan KNI (pranata resmi Republik yang terdapat di setiap daerah untuk tujuan merekrut para pemimpin terkemuka dalam arti bertindak sebagai badan perwakilan rakyat sementara¹¹⁸).

KNI Sumatra Barat didirikan di Padang pada tanggal 31 Agustus 1945. Anggota organisasi ini umumnya pernah mendapat pendidikan Belanda dan sebagian pernah sampai ke tingkat sarjana, suatu prestasi yang amat langka pada masa itu. Mereka inilah tokoh-tokoh penting dan sampai tingkat tertentu rekrutmen pemimpin KNI mencerminkan upaya pemimpin daerah saat itu menyesuaikan implementasi politik nasional ke dalam idiom kepemimpinan Minangkabau yang ideal, yang terdiri dari unsur intelektual, tokoh-tokoh agama dan adat (*Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*). Salah satu tokohnya Mr.Moh.Rasjid begitu gigih menganjurkan agar pimpinan harian KNI di setiap kota dan pelosok nagari di Sumatera Barat wajib memasukkan unsur nasionalis dan tokoh agama (Zed dkk, 1998:18).

Tabel 1 KNI Daerah Sumatera Barat 1945-1946

Kedudukan	Nama	Profesi Sebelum Proklamasi
Ketua	Moh.Sjafei	Guru INS
Ketua Muda I	Dt.Perpatih Baringek	Wk.Mk.raad
Ketua Muda II	Dr.M.Djamil	Dokter
Setia Usaha Bagian Persatuan & Pendidikan	- Mr.St.Moh.Rasjid - Mr.Moh.Nasroen - Sa'aduddin Djambek	Jaksa Pengacara Ulama Muda
Badan Penolong Keluarga	Ch.Sulaiman, Ismail Lengah, Sulaiman dan H.A Wahab	Pemuda Intelektual
Bagian Penanganan Korban Perang	Amin, Dr.Nazaruddin dan Burhanuddin	
Keamanan Rakyat	Ismail Lengah, Ahmaddin Dt.Barbangso Sulaiman dan Raden Sulaiman	Giyugun, polisi

Kesejahteraan Rakyat	Dt.Madjo Urang, Umar Marah, Alamsjah, Dt.Athos Ausri dan Mr.Nazaruddin	
Kaum Ibu dan Keputrian	Ny.Rangkayo, Dt.Tumanggung, Sjamsidar Jahja, Zubaedah Munaf, Hafifah Landjunin	Wanita aktivis

Sumber : Mestika Zed dkk, 1998. Hal.20

Pada tanggal 1 september 1945, Komite Nasional Indonesia (KNI) menyelenggarakan rapat pertama di Padang, sidang itu memilih Mohammad Sjafe'i sebagai Residen Sumatra Barat yang pertama¹¹⁹. Tenggang waktu antara menyerahnya Jepang pada 14 Agustus dan masuknya tentara sekutu di Indonesia beberapa minggu kemudian telah memungkinkan tokoh-tokoh Republik di Jawa dan Sumatra membangun pijakan yang kuat bagi kemerdekaan Indonesia.

Sejak akhir Agustus 1945 Moh.Sjafei telah dipandang sebagai Residen Sumatera Barat, walaupun belum resmi dan telah melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan pemerintahan daerah. Pada 29 september 1945 Presiden Soekarno telah mengangkat Mr.Teuku M.Hasan menjadi Gubernur Sumatera sebagai wakil pemerintah pusat. Baru pada 3 oktober 1945 Gubernur Sumatera mengangkat semua residen untuk seluruh Sumatera, sehingga mulai dari hari itulah Moh.Sjafei resmi menjadi Residen Negara Republik Indonesia yang pertama untuk daerah Sumatera Barat. Moh.Sjafei kemudian menyusun pemerintahan di Sumatera Barat dengan mengeluarkan ketetapan pada 8 Oktober 1945 dengan susunan sebagai berikut¹²⁰:

¹¹⁹ Dengan adanya ranting KNI sampai ke nagari-nagari berarti demokrasi berjalan dan kedaulatan rakyat dihormati. Di Minangkabau praktek demokrasi sudah lama dijalankan. Dengan susunan pemerintahan sampai ke desa-desa, nagari-nagari, rakyat merasa ikut bertanggung jawab atas buruk baik dan keselamatan rakyat merdeka. Segala putusan diambil dengan mufakat, seperti kata pepatah minang: *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik* (Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat). Ketua KNI pertama pada akhir september 1945 terpilih Dr.M.Djamil (Husein, 1991: 117)

¹²⁰ Husein, Op.Cit. hal.121

Susunan Pemerintahan Sumatera Barat Tahun 1945

Kepala Luhak

Padang dan sekitarnya	Djamaloes Jahja
Kerinci/Inderapura	M.Jarjis Bebastani
Tanah Datar	Parlin gelar St.Alamsjah
Agam	St.Moh.Djosan
Solok/Sawahlunto	St.Diatas gelar Dt.Bagindo Radjo
Pasaman	Abd.Rahman gelar St.Larangan
Demang dan Demang Muda (Mengepalai urusan Pemerintahan Residen)	
Urusan Umum di kantor Residen Sumatera Barat	- Roesad gelar Dt.Perpatih nan Baringek
Urusan surat menyurat di kantor Residen	- Arif gelar Dt.Madjo Oerang
Kejaksaan termasuk Kejaksaan Tinggi	- Mr.S.M.Rasjid
Pengadilan termasuk Pengadilan Tinggi	- Mr.Haroen Alrasjid
Polisi	- Raden Soelaiman
Kesehatan	- Dr.Moehammad Djamil
Pengajaran	- A.Moeloek
Urusan Pekerjaan Umum	- Moh.Jasin Dt.Kajo
Pertanian	- Moehammad Said
Urusan Ternak	- A.H.Endamora
Urusan Kehutanan	- Amir Hakim Siregar
Perhitungan Uang Negara	- R.M Sandjojo
Administrasi Kas Negara	- Sastraningrat
Pajak	- Agus Sastradipraja
Pegadaian	- Raden Soepardi
Kas Negara	- Mohammad Jakin
Duane	- Getti Heran gelar St.Namora
Cukai dan Perhubungan Laut	- Aboe Nawas
Candu/Garam	- Sjamoeeddin
Tera	- Boerhanoeddin gelar Dt.Radjo Besar
	- M.Soetomo

Pos, kawat, telepon dan radio	- Soedibjo
Umbilin (tambang batubara Sawahlunto)	- Roesli

Sumber : Husein dkk, 1991

Masa pemerintahan Residen Sjafei tidak lama, sampat akhir oktober 1945. Hanya kurang lebih dua setengah bulan jabatan tersebut kemudian beralih ke Roesad Dt.Perpatih Nan Baringek. Tetapi sebagai Residen pertama Sumatera Barat, Moh.Sjafei telah mempelopori dan merintis adanya satu pemerintahan di Sumatera Barat. Dengan pengangkatan Roesad sebagai Residen Sumatera Barat pada tanggal 15 November 1945 dimulailah reorganisasi pemerintahan; para demang, demang muda dan Bupati-bupati harus diganti. Maka pada tanggal 23 januari 1946 diumumkanlah perubahan-perubahan dalam kepamongprajaan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah¹²¹.

Kekuatan Pemuda

Pada awal kemerdekaan pemuda Sumatra Barat telah dipersatukan dalam organisasi pemuda yang didirikan hampir serentak pada minggu-minggu pertama setelah proklamasi di dua kota utama: Padang dan Bukittinggi. Masing-masingnya adalah "Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Padang dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Bukittinggi. Kedua organisasi ini diprakarsai oleh dua orang pemuda bekas Giyugun, Ismail Lengah dan Dahlan Djambek (Zed dkk, 1998:21).

Tatkala Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan ke santero dunia, rakyat di Sumatera Tengah baru mengetahuinya tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu Ismael Lengah berhadapan dengan tiga tokoh (Chatib Sulaeman, Engku Abdullah dan Inyiak Basa Bandaro) mengajukan konsepsi pemikirannya yang terdiri dari 3 pokok utama¹²².

¹²¹ Husein, *Ibid*, hal...

¹²² Il...

Satu : perlu segera mendirikan Balai penerangan Pemuda Indonesia

(BPPI)

Dua : Menyusun badan Keamanan Rakyat (BKR)

Tiga : disusul segera dengan mendirikan Pendidikan Opsir.

Meskipun dalam kedua organisasi pemuda itu tidak ada pemisahan yang tegas antara pemuda aktivis (politisi muda) dan yang pernah mendapat pendidikan militer Jepang, tetapi secara umum keanggotaannya memang bisa dibagi ke dalam dua kelompok; kelompok pemuda aktivis politik¹²³ sejak sebelum perang berpusat di tiga kota utama: Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi dan kelompok pemuda tipe kedua adalah para pemuda yang memperoleh pendidikan militer Jepang (alumni Giyugun dan Heiho). Sebagai generasi muda terpilih mereka mendapat latihan militer dan cara berorganisasi sekadarnya dari program militerisasi Jepang. Mereka merupakan kekuatan pendorong dalam menyulut aksi-aksi pemuda dalam menaikkan bendera, penyebarluasan berita proklamasi dan menyusun kekuatan pemuda di daerah-daerah (Zed dkk, 1998: 21-22).

Secara keseluruhan kedua organisasi pemuda BPPI di Padang dan PRI di Bukittinggi telah menyatukan kelompok pemuda aktivis politik dan pemuda militer. Sampai tingkat tertentu, mereka telah berperan sebagai kelompok penekan dan ikut mempengaruhi gerak perjuangan dalam periode awal revolusi. Bagaimanapun juga, perbedaan orientasi keorganisasian antara BPPI di Padang dan PRI di Bukittinggi tidak menghalangi cita-cita persatuan. Dua peristiwa penting yang turut mempengaruhi konfigurasi kepemimpinan revolusi di daerah ini pada akhir tahun 1945 adalah pendaratan tentara sekutu di Padang bulan oktober dan pembentukan partai-partai satu bulan kemudian.

BKR dan Divisi Banteng

¹²³ Tokoh aktivis politik antara lain: Chatib Sulaiman, Leon Salim (keduanya adalah aktivis PNI-baru pimpinan Hatta bersama-sama Djoeir Moehammad, Djali Jahja dan Harun Junus. Kelompok pemuda yang memperoleh pendidikan militer Jepang diantaranya Ismail Lengah, Dahlan Djambek dan Sjarif Usman dan kawan-kawan. Lebih lengkap lihat Zed dkk, 1998, Op.Cit.hal.21-22

Sebagai salah satu unsur dalam sistem Ketatanegaraan, RI perlu memiliki satu tentara resmi. Sejalan dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 oktober 1945, maka KNI pusat juga telah mengeluarkan maklumat yang isinya memobilisasi Tentara Keamanan rakyat (dari eks prajurit PETA, prajurit Hindia Belanda, Heiho, Kaigun Heiho. Di Sumatera Barat maklumat tersebut segera mewujud menjadi satu kenyataan (Husein, 1991: 137-138).

Tabel Susunan Divisi III (Divisi Banteng) Sumatera Tengah (Per Oktober 1945)

Resimen & Batalion	Markas	Teritorial	Komandan
Resimen 1	Bukittinggi	Sektor Utara	Letkol Sjarief Usman
Batalion 1	Merapi	Padang panjang	Mayor Anas
Batalion II		Bukittinggi	Mayor A.Halim
Batalion III		Payakumbuh	Mayor Makinuddin
Resimen 2	Sawahlunto	Sektor Selatan	Letkol.Dahlan Ibrahim
Batalion 1		Solok	Mayor Mansur Sami
Batalion II		Batusangkar	Sofyjan Ibrahim
Batalion III		Kerinci/Sungai penuh	Mayor A.Thalib
Resimen 3	Lb.Alung	Padang Area	Letkol Ismael Lengah
Batalion I	Padang		Mayor Ahmad Husein
Batalion II		Pariaman	Mayor Mahyuddin Tonek
Batalion III	Painan		May.Alwi St.Marajo
Resimen 4	Pekan Baru	Riau	Letkol Hasan Basri
Batalion I	Pekan Baru		May.D.I Panjaitan
Batalion II	Bengkalis		May.Arifin Ahmad
Batalion III	Rengat		May.Jusuf Nur
Batalion IV	Pakan Baru Kota		May.Usman Pohan
Batalion V	Pakan baru	Luar Kota	May.Ali Rasjid

Sumber : dikutip kembali dari Zed dkk dengan sumber Kodam III/17 Agustus. Andre...

Partai Politik di Sumatera Barat

Pada tanggal 3 November 1945 wakil Presiden Hatta menandatangani dekrit yang membolehkan adanya partai-partai di seluruh daerah. Partai Politik paling kuat di Sumatera Barat adalah Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia), suatu partai yang sebelumnya berasal dari fusi dua organisasi Islam Muhammadiyah dan MIT (majelis Tinggi Islam dan Muhammadiyah). Pimpinan partai Masyumi adalah A.R.Sutan Mansyur. Mendekati kekuatan Masyumi baik politis maupun militer adalah partai tradisional Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiah) pimpinan H.Sirajuddin Abbas. Kekuatan berikutnya adalah Tentara Merah Indonesia (TEMI) di bawah PKI dengan Bachtaruddin sebagai pimpinannya. Ada juga partai adat yaitu MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang telah berdiri sejak 1937 dan tetap hidup masa pendudukan Jepang, berada di bawah pimpinan tokoh adat Dt.Simaradjo (Zed, 1998:28-29). Partai-partai politik dibentuk dari seluruh spektrum politik (Kahin, 2008:173).

Tabel Susunan Partai-partai Politik Sumatera Tengah 1945-1946

No	Partai	Tgl.Didirikan	Pimpinan	Nama Lasykar
1	Perti (partai Islam)	26 Nov.1945	Siradjudin Abbas	Lasymi
2	MIT	Des 1945	A.R.St.Mansur	
3	Masyumi (Partai Islam)	Februari 1946	Iljas Jacoub	Hizbullah dan Sabilillah
4	PSII	18 November 1945	Harun Junus	
5	PKI	12 November 1945	Bachtaruddin	
6	MTKAAM	21 Desember 1945	Dt.Simaradjo	
7	P.Sosialis	Feb 1946	Chatib Soelaiman	
8	PNI	Baru direorganisir tahun 1947		

Sumber : Zed dkk, (1998:29), Kahin (2008:171)

Peristiwa yang heroik juga pada periode 1945-1950 di Sumatera Barat adalah adanya Gerakan Baso tahun 1946 dan peristiwa 3 maret 1947. Gerakan Baso (dimotori oleh Abdul Rahman Tuanku Nan Putih dan Boerhan Tuanku Nan Hitam) yang terpengaruh pemikiran Tan Malaka menyerukan aksi revolusioner melawan Belanda. Tetapi kemudian karena begitu radikalnya terjemahan terhadap pemikiran Tan Malaka, aksi tersebut berakhir dengan penangkapan dan pembunuhan banyak pejabat Minangkabau yang pernah berkuasa di masa Belanda. Sehingga penguasa Republik kemudian tidak dapat mentolerir, sehingga pada 16 april 1946 komandan Divisi Dahlan Djambek memerintahkan batalion Abdul Halim menumpas habis gerakan Baso. Tuanku nan putih dan Tuanku Nan Hitam adalah orang pertama yang ditangkap¹²⁴.

Selanjutnya peristiwa 3 maret 1947 sebagai pengaruh dari kembalinya pasukan sekutu ke Indonesia. Di mana pada maret 1947 tersebut laskar-laskar muslim mengangkat senjata melawan pemerintahan Republik di Bukittinggi dan di beberapa kota lain di Sumatera Barat (yang terjadi bersamaan dengan sidang KNI Pusat dengan pihak Belanda membuat perjanjian Linggarjati)¹²⁵. Di Sumatera Barat perjanjian Linggarjati mengharuskan tentara Republik mundur dari Padang, yang membuat orang Sumatera Barat berang (Kahin, 2008:183-184).

Terdapat kekecewaan-kekecewaan terhadap isi perjanjian Linggarjati dan kekecewaan lainnya terhadap pemerintahan Republik masa itu, terutama oleh laskar Islam. Kelompok yang memimpin pemberontakan terhadap kepemimpinan residen tersebut sebagian berasal dari partai politik Islam dan dari laskar agama dan sekuler. Kelompok ini diketuai oleh tokoh tua radikal Muhammadiyah, Saalah J.St.Mangkuto dan ulama eksentrik Adam B.B dari Padang Panjang. Bersama sejumlah tokoh

¹²⁴ Lebih lengkapnya baca Kahin, *Op.Cit.* hal.173-182

¹²⁵ Dalam perjanjian Linggarjati pemerintah Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik atas Jawa dan Sumatera, dan kedua pihak sepakat mengupayakan pembentukan "negara federal yang berdaulat dan demokratis", Negara Indonesia Serikat yang menjadi bagian dari Uni Belanda-Indonesia.

laskar Ihsam Hizbullah, Sabilillah dan Lasjmi. Ikut pula Nazaruddin Dt. Radjo Mangkuto, pemimpin laskar partai adat (MTKAAM) (Kahin, 2008:184-186).

Pertama, ketidakpuasan atas ketimpangan antara kekuatan politik Islam di tingkat pemerintahan nagari dan kurangnya keterwakilan mereka ditingkat keresidenan, yang tampak pada pasca-pemilihan 1946.

Kedua adanya tuduhan bahwa pemimpin keresidenan memiliki hubungan dekat dengan Belanda sehingga mereka berusaha memperlambat laju revolusi. *Ketiga*, ketidaksenangan yang dirasakan oleh pasukan di garis depan, baik tentara reguler maupun laskar-laskar, terhadap perwira-perwira militer di Bukittinggi. *Keempat*, kemarahan laskar karena hampir semua perbekalan dan perlengkapan pasukan hanya diperuntukkan bagi tentara reguler (Kahin, 2008:184).

Pada tanggal 4 maret 1946 pagi menjadi jelas, kudeta tersebut gagal. Dua tokohnya Saalah St.Mangkuto dan Nazaruddin diseret kepengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pemberontakan tersebut¹²⁶. Agresi militer Belanda tahun 1947 melanggar perjanjian Linggarjati yang telah disepakati. Aksi tersebut dikutuk masyarakat internasional. Atas upaya komisi tiga negara dari Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) duduk berunding pada desember 1947 di atas kapal renville.

Penutup

Tata pemerintahan dan birokrasi di Sumatera Barat pada awal kemerdekaan dapat dikatakan mengikuti arus politik dari pemerintahan pusat saat itu yang juga ditarik oleh pusaran bekas-bekas kolonialisme di nusantara serta perang dunia ke dua. Pergantian Residen Sumatera Barat

yang cepat seolah mengikut kepada perubahan kabinet Indonesia periode 1945-1948 yang berganti-ganti. Menurut Husein¹²⁷:

1. M.Sjafei memerintah : 15-9 1945 sampai 15-11-1945 (2 bulan)
2. Rusad memerintah : 1-12-1945 sampai 15-3-1946 (3,5 bulan)
3. Dr.M.Djamil : 18-3-1945 sampai 1-7-1946 (3,5 bulan)

Setelah Republik menyetujui perjanjian Renville Januari 1948 pemerintah menghadapi situasi yang terpecah. Perdana Menteri Amir Syariffudin digantikan oleh Perdana Menteri Hatta yang mengisi kabinet hampir semuanya berasal dari Masjumi dan PNI (Kahin 2008:201). Memasuki tahun 1950 penduduk Sumatera Barat mulai menghirup alam merdeka dalam arti bebas dari kekuasaan asing. Dibandingkan dengan suasana *geest* (spirit) pada awal Proklamasi tampaklah sangat kontras sekali dengan keadaan awal 1950. Pada awal proklamasi, walau menderita dan sengsara akibat pendudukan Jepang, orang mau "menyerahkan segala-galanya, sekalipun nyawa terancam, hartanya habis, rumahnya terbakar dan anaknya tewas di medan pertempuran". Tetapi perasaan tidak puas, perasaan jengkel dan putus asa muncul ke permukaan, yang merupakan konsekwensi tak terelakkan dari kengerian esensial dari kehidupan zaman perang (Zed dkk, 1998:111).

Pengangguran "bekas pejuang" merupakan fenomena, ironisnya banyak yang mendapat perlakuan tidak wajar. Perkembangan yang kurang menyenangkan ini telah mendorong sejumlah perwira bekas Divisi Banteng yang masih aktif mengadakan reuni. Inilah salah satu faktor pemicu pergolakan PRRI di kemudian hari¹²⁸.

Perang menjadikan masyarakat Sumatera Barat seolah prajurit. Mengutip apa yang dikatakan Hatta, "bahwa kalau datang serangan Belanda, tiap-tiap orang akan menjadi prajurit, tiap-tiap kampung akan menjadi benteng dan semua yang ditinggalkan akan di bumi-hanguskan". Tiap-tiap orang akan mencari-cari jalan keluar dan sebelum jalan itu

¹²⁷ Husein dkk. *On Civil...*

ditemukan, meletuslah *clash* kedua sebagai suatu "blessing in disguise" (kurnia yang terselubung), karena menjadi bersatulah kembali bangsa Indonesia menghadapi musuh sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Rusli, , 1985 *Sumatra Barat, Plakat Panjang*, Jakarta : Sinar Harapan
- Beetham, David, 1990, *Birokrasi* (terj), Jakarta : Bumi Aksara
- Braibanti, Ralph (ed), 1969 , *Political and Administrative Development*, Durham: Duke University Press,
- Djohan, Djohermansyah, 1990 *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, Sebuah Kasus dari Daerah Sumatra Barat*, Jakarta : Bumi Aksara
- Durin, Hasan Basri, , 1997, *Catatan Seorang Pamong*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Geddes, Barbara, , 1994, *Politician's Dilemma*, London: University of California Press
- Huntington, S, 1968, *Political Order in Changing Societies*, New Haven : Yale University Press,
- Husein, Ahmad, dkk, 1991, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950*, Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM)
- Ishiyama, John T and Breuning, Marijke, (ed), 2013, terj, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Jalal, Fasli dkk (ed), 2004, *Minangkabau yang Gelisah*, Bandung: Lubuk Agung
- Kahin, Audrey, 2008, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
- Kian Wie, Thee (ed), 2005, *The Asia-Pacific Century Historical Perspective*, Jakarta: LIPI Press,
- LaPalombara, Joseph (ed), 1967, *Bureaucracy and Political Development*, New Jersey: Princeton University Press,
- Meier, Kenneth J and Bohte, John, 2007, *Politics and The Bureaucracy, Policymaking in the fourth Branch of Government*, Canada : Thompson Wadsworth
- Radjab, Muhamad, 1954, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kemetrian P.P.dan K,
- Pye, Lucian W and Verba, Sidney (ed), 1965, *Political Culture and Political Development*, New Jersey : Princeton University Press